

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hardono
Jabatan : Kasubdit Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan
BUMN dan BUMD

Selanjutnya disebut pihak pertama

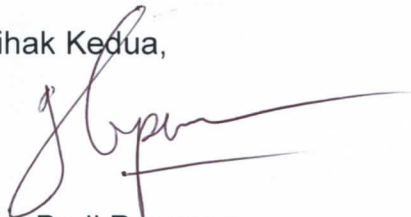
Nama : Gumbira Budi Purnama
Jabatan : Plh. Direktur Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Gumbira Budi Purnama
NIP 19711227 199903 1 001

Jakarta, 31 Agustus 2017
Pihak Pertama,



Hardono
NIP 19670214 199403 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SUB DIREKTORAT INVESTIGASI HAMBATAN KELANCARAN PEMBANGUNAN
BUMN dan BUMD

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Sasaran Program		
1	Meningkatnya efektifitas hasil pengawasan keinvestigasian	Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	70%
		Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	70%
		Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	60%
2	Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional	Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan	70%
	Sasaran Kegiatan		
	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan pada Direktorat Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan	Jumlah laporan hasil audit penyesuaian harga	1
		Jumlah laporan hasil audit klaim	1
		Jumlah laporan hasil pengawasan dalam rangka pemberian rekomendasi strategis	1
		Jumlah laporan hasil evaluasi hambatan kelancaran pembangunan	2
		Jumlah laporan pemantauan/ monitoring/QA	13